



RENCANA KERJA TAHUN 2025

**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, yang juga atas berkenan-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 dapat diselesaikan. RencanaKerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pelaksanaan dan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026.

Terimakasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 ini. Dokumen Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI	6
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024)	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	48
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	60
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	62
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	63
3.3. Program dan Kegiatan	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	72
BAB V PENUTUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik pada aspek lingkungan maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi.

Rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 22 Desember 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Dengan diberlakukannya peraturan Daerah tersebut yang awalnya Dinas Komunikasi, Informatika, Kerasipan dan Perputakaan Kota Cimahi berubah menjadi dua dinas yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Arsip Daerah. Dalam Pasal 6 ayat 2 huruf p disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dengan perubahan tersebut maka harus disusun rencana kerja sebagai landasan pelaksanaan bagi program

dan kegiatan yang dilaksana oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

Dengan disusunnya rencana kerja ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian visi misi Kota Cimahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- a) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
- b) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g) Kepres No. 50 tahun 1997 tentang Pedoman Umum Perpustakaan
- h) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan Daerah

- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan dokumen dasar bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah merencanakan pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai tahapan untuk mencapai target akhir Renstra untuk Mewujudkan Cimahi Kota Cerdas (Creative, Egalitarian, Religius, Developable, Accretive dan Sustainable).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Maksud dan Tujuan,

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERAGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2023) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2023)

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Komuikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026, pagu anggaran Belanja yang diharapkan untuk kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 13.247.214.000. Perbandingan Anggaran belanja berdasarkan Rencana Strategis dengan DPA Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

URAIAN	Jumlah (Rp.)	Prosentase (%)
Pagu Anggaran Belanja Rencana Strategis Tahun 2023	13.247.214.000	
Pagu Anggaran Belanja DPA Tahun 2023	13.052.061.595	98,53%

Hasil evaluasi terhadap pencapaian target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	4,02	134,00%
2	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48	113,10%
3	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2,00	2,53	126,50%
4	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	116,52%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	55,00	86,93	158,11%

Capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi pada tahun 2023, sesuai dengan dokumen Renstra tahun 2023-2026 dapat dinilai melalui upaya pengukuran kinerja. Sedangkan dokumen Perjanjian Kinerja Diskominfo Kota Cimahi Tahun 2023 menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja yang akan dicapai. Realisasi pada akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa keseluruhan sasaran dapat dicapai dengan sangat baik. Rata-rata capaian indikator dan evaluasi kinerja rata-rata sebesar 126,65%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi. Indeks SPBE pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,00. Berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi capaian SPBE Kota Cimahi sebesar 4,02 dengan predikat sangat baik, sehingga tingkat capaian kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 sudah melebihi harapan/target yaitu sebesar 134% (sangat baik).

Keterbukaan informasi publik pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80, berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan peringkat penerapan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 90,48 dengan kualifikasi Informatif. Capaian kinerja sasaran Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik mencapai 113,10% sehingga capaian kinerja Indeks keterbukaan Informasi Publik tercapai melebihi harapan dengan predikat sangat baik.

Sasaran “Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas” Indeks Pembangunan Statistik diukur melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara rinci penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintah daerah; dan
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

Target IPS pada tahun 2023 sebesar 2,00 dan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sebesar 2,53 dengan kategori Cukup sehingga capaian indikator sebesar 126,50% (sangat baik) melebihi harapan.

Sasaran meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah diukur menggunakan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks (KAMI) merupakan alat untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Evaluasi dilakukan terhadap sebagai berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memnuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Pada Tahun 2023 Indeks KAMI yang ditargetkan adalah 351 dan hasil penilaian yang telah dilakukan sebesar 409 dengan demikian capaian sasaran meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah tercapai melampaui target sebesar 116,52% (sangat baik).

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan

sebuah instrumen alat (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja pembangunan.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Penilaian Indeks RB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 sampai dengan penyusunan LKIP ini belum diperoleh hasil oleh karena itu pengukuran kinerja menggunakan hasil tahun 2022 sebesar 78,71, maka capaian kinerja tercapai melebihi harapan dengan capaian sebesar 143,11% (sangat baik).

Terdapat 3 urusan dan 1 non urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, yang terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan. Pencapaian sasaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 Kota Cimahi per urusan sebagai berikut:

a. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Tabel 2.5. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023, Bidang Informasi. Komunikasi Publik dan Statistik

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN (Rp)
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	
	BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK					
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60	100	2.278.917.450

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN (Rp)
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	persen	82	82	2.278.917.450
	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	12	136.900.000
	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	10 Layanan Hubungan Media	Layanan	10	10	1.957.354.950
	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	12	241.519.642
URUSAN STATISTIK						
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persen	37	100	398.910.045
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dataset ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Dataset	200	200	72.059.425
	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	20	20	72.059.425
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah orang SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;	Orang	45	45	326.850.620

b. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian

Tabel 2.6. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023, Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN (Rp)
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	
	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DAN PERSANDIAN					
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Teknologi	Indeks	2,5	4,75	2.968.791.766

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN (Rp)
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	
		Informasi dan Komunikasi				
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	persen	90	90	1.700.404.690
	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75 unit Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	persen	50	100	1.193.023.310
	Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persen	85	85	1.268.387.076
	Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	241.519.642
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	1	430.827.838
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1	1	60.846.400
	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	4	426.178.205
	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	1	109.014.991
URUSAN PERSANDIAN						
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	33	100	398.910.045

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN (Rp)
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Peresen	10	15	72.059.425
	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	1	30	72.059.425
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Persen	3	40	326.850.620
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	101.897.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	15	30	224.952.920

c. Urusan Penunjang

Tabel 2.8. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023, Urusan Penunjang

N O	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	
	URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN					
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai	71	78,6	6.335.677.066
1		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	50	79,61	
2		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	76,61	84,72	
3	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase dokumen perencanaan dan	persen	100	100	43.383.840

N O	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi yang disusun				
4	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan PD	Dokumen	2	2	23.559.840
5	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD	Dokumen	16	16	19.824.000
6	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	Persen	75	75	15.409.895
7	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	5	15.409.895
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	Bulan	12	12	372.322.093
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	40	35.364.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	15	16.394.650
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	146.981.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	50	173.582.243
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	83.808.447
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16	16	39.007.352
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16	16	627.251
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	16	44.173.844
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12	12	295.558.031
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	Unit	5	5	108.506.600

N O	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	
	Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	162.933.431
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	15	24.118.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100	100	83.947.000
	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai	40	40	83.947.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	Dokumen	12	12	5.441.247.760
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	34	5.425.339.060
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	18	18	15.908.700

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.9. Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pagu Anggaran Tahun 2023	13.052.061.595
2	Realisasi Anggaran s.d. Desember 2023	12.106.745.558
3	Persentase realisasi anggaran	92,76%

Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.10. Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023

NO	Sasaran	URAIAN	TARGET		REALISASI		PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN (%)
		PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			3,00 Indeks SPBE		4,02 Indeks SPBE	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.078.445.802	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks 2,5)	2.968.791.766	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks 4,75)	96,44%
		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.768.773.511	90 Persen perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	1.700.404.690	90 Persen perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	96,13%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.768.773.511	75 unit Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.700.404.690	75 unit Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	96,13%

		Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.309.672.291	85 persen aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	1.268.387.076	85 persen aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	96,85%
		Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	256.976.650	1 Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	241.519.642	1 Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19,33%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	431.528.437	1unit Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	430.827.838	1unit Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	99,84%
		Sub Kegiatan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	61.573.000	1 Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	60.846.400	1 Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	98,82%
		Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	433.182.204	1 unit Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	426.178.205	4 unit Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	98,38%
		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	126.412.000	1 Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	109.014.991	1 Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	86,24%

2	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik			80 Indeks Keterbukaan Informasi Publik		90,48 Indeks Keterbukaan Informasi Publik	
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.278.917.450	60 Persen Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.159.908.910	60 Persen Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94,78%
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.278.917.450	82 persen analisis berita yang berkonten positif	2.159.908.910	82 persen analisis berita yang berkonten positif	94,78%
		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	136.900.000	12 Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	131.226.093	12 Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	95,86%
		Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1.957.354.950	10 Layanan Hubungan Media	1.869.444.718	10 Layanan Hubungan Media	95,51%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	184.662.500	12 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	159.238.099	12 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	86,23%
3	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas			2,00 Indeks Pembangunan Statistik		2,53 Indeks Pembangunan Statistik	

		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	253.312.500	37 Person Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	243.457.771	100 Person Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	96,11%
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	253.312.500	200 Dataset ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	243.457.771	830 Dataset ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	96,11%
		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	226.124.000	20 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	217.457.771	20 Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	96,17%
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	27.188.500	45 orang SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;	26.000.000	45 orang SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;	95,63%
4	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah			351 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		409 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	406.280.000	33 Person Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	398.910.045	100 Person Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	98,19%

		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	72.520.000	10 Persen titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	72.059.425	15 Persen titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	99,36%
		Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72.520.000	1 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	72.059.425	30 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	99,36%
		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	333.760.000	3 Persen ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	326.850.620	40 Persen ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	97,93%
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103.500.000	1 Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	101.897.700	1 Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98,45%
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	230.260.000	15 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	224.952.920	15 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	97,70%
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah			55 Indeks Reformasi Birokrasi		78,71 Indeks Reformasi Birokrasi	

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.035.105.843	71 Nilai Sakip Pemerintah Daerah	6.335.677.066	78,66 Nilai Sakip Pemerintah Daerah	90,06%
				50 Indeks Profesionalitas ASN		50 Persen ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	
				76,61 Nilai IKM Perangkat Daerah		84,72 Nilai IKM Perangkat Daerah	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.549.700	100 persen dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	43.383.840	100 persen Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	99,62%
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.824.000	2 dokumen Perencanaan PD	23.559.840	2 dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan PD	118,85%
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.725.700	16 dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD	19.824.000	16 dokumen Laporan Evaluasi Kinerja PD	83,55%
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.085.000	75 persen penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	15.409.895	100 persen Pesentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	95,80%
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.085.000	5 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.409.895	5 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95,80%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.403.900	12 Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	372.322.093	12 Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	94,64%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.901.000	40 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35.364.200	45 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	95,84%

		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.984.500	15 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16.394.650	15 Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	78,13%
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.569.400	3 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	146.981.000	3 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	91,54%
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.949.000	50 laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.582.243	177 laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,22%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.975.000	12 bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	83.808.447	6 bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	98,63%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.540.000	16 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.007.352	16 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	98,65%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000	16 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	627.251	16 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62,73%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.435.000	16 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	44.173.844	16 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	99,41%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.980.890	12 bulan pemeliharaan barang milik daerah	295.558.031	12 bulan pemeliharaan barang milik daerah	97,55%

		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.090.000	5 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108.506.600	5 unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96,80%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	166.060.890	1 Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	162.933.431	1 Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	98,12%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.830.000	15 unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24.118.000	15 unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	97,13%
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.047.000	100 persen Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	83.947.000	100 persen Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	95,34%
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88.047.000	40 pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	83.947.000	45 pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	95,34%
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.106.064.353	12 Dokumen Keuangan Yang Disusun	5.441.247.760	12 Dokumen Keuangan Yang Disusun	89,11%
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.090.081.053	34 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.425.339.060	34 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89,08%

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.983.300	18 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.908.700	18 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99,53%
TOTAL		13.052.061.595		12.106.745.558		92,76%

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat disimpulkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terpenuhinya target kinerja sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi masih belum memenuhi kebutuhan organisasi.
2. Aplikasi eksisting belum tersedia yang secara khusus menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan level top management
3. Penyelenggaraan program smart city yang masih belum optimal
4. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE belum menjadi rujukan pengembangan SPBE Kota Cimahi bagi seluruh Perangkat Daerah
5. Command Center belum termanfaatkan dengan optimal, belum ada aplikasi khusus untuk dashboard Command Center
6. Kondisi Server, Perangkat Aktif Pusat Data, Perangkat Aktif Jaringan, UPS dan Kabel UTP RJ45 konektor sudah berusia lebih dari 5 tahun yang sudah rentan terhadap kerusakan.
7. Data tidak terstandar sesuai prinsip satu data.
8. Data tidak berkualitas (Tidak konsisten, tidak tepat waktu).
9. Belum ada publikasi data hasil analisis dan pengolahan.
10. Penyimpanan data sektoral belum terpusat.
11. Penyebaran informasi pembangunan daerah belum optimal.
12. Belum adanya daftar klasifikasi informasi.

Dari hasil indentifikasi dan uraian faktor-faktor di atas perlu diambil langkah dan kebijakan strategis agar sasaran dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya.

Kebijakan dan tindakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan SPBE (Review Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan Aplikasi SIA SPBE Kemenpan RB)
2. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Penyediaan Backup Link Jaringan WAN, Peremajaan Perangkat Aktif Jaringan, Penambahan Kapasitas Bandwidth, Penambahan Titik Wifi Publik, Integrasi Jaringan CCTV), sebagai solusi untuk layanan jaringan ke OPD yang sering terputus
3. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pusat Data Pemerintah Daerah (Peremajaan dan Penambahan Kapasitas Server, optimalisasi Backup Server dan Pusat Data Nasional) untuk memenuhi peningkatan performance dan kebutuhan penyimpanan data yang terus bertambah
4. Pelaksanaan Audit TIK
5. Pengembangan Kompetensi SDM TIK
6. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
7. Peningkatan Tingkat Kematangan Aplikasi Layanan Publik
8. Peningkatan interoperabilitas antar aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLD) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
9. Pembangunan aplikasi layanan Publik dan Administrasi Pemerintah Berbasis SSO (SIBANGJAKA, PMKS, SIMRENDAN, SIMAK), Pengintegrasian Aplikasi Layanan Publik Berbasis SSO POLAKAMI (Sidakeptri, Piramida, BPHTB), Pengembangan Modul Dashboard Eksekutif.
10. Penguatan dan Peningkatan Kolaborasi Tim Koordinasi SPBE
11. Penguatan dan Pembinaan Relawan TIK dan Forum Usaha Relawan TIK Kota Cimahi sebagai Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.
12. Pendampingan dan penguatan Inovasi Digital Masterplan Smart City (Smart Governance) untuk Peningkatan Tingkat Kematangan Aplikasi.

13. Pelaksanaan *Surveillance* ISO 27001:2022 untuk lingkup Pusat Data dan Persiapan untuk lingkup Aplikasi.
14. Pelaksanaan *Surveillance* CIMAHI-CSIRT (Tim Tanggap Insiden Siber Kota Cimahi).
15. Pelaksanaan *Surveillance* Mail Server dan SIEM (Sistem Informasi Event Management) terkait deteksi ancaman siber.
16. Pelaksanaan Vulnerability Assement / Penetration Test untuk 25 Sistem Elektronik.
17. Pelaksanaan Akselerasi Penerbitan Sertifikat Elektronik untuk 4.500 Pegawai ASN dan PPPK dala kegiatan JUMAT-TTE.
18. Perbantuan Paspampres RI terkait Layanan Jamming VVIP Presiden
19. Pelaksanaan *Surveillance* Evidence Indeks KAMI untuk verifikasi BSSN.
20. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimtek maupun *transfer knowledge*.
21. Peningkatan kesadaran keamanan (Security Awareness) dalam bentuk JUMATKAMI (Jumat Kabar Keamanan Informasi) setiap minggu.
22. Meningkatkan Ketersediaan Daftar Informasi Publik yang ada di Kota Cimahi.
23. Pengembangan Fitur sehingga Masyarakat ataupun OPD bisa mengakses permohonan informasi secara mandiri Melalui SIMPONI
24. Pemberian akun SP4N-LAPOR! Kepada seluruh Perangkat daerah agar dapat ditangani lebih cepat dan efisien
25. Standar Pelayanan untuk kegiatan publikasi di media massa berupa Advetorial, Talkshow, Greeting, Iklan Layanan Masyarakat dan publikasi melalui media luar ruang.
26. Memperbaiki dan evaluasi pelaksanaan registrasi media di Diskominfo Kota Cimahi.
27. Peningkatan kompetensi staf Relasi Media dan SKPD lainnya yang ada di Kota Cimahi. (Dengan adanya peningkatan SDM Relasi Media pada Diskominfo dan Perangkat Daerah lainnya diharapkan

Personil SKPD memiliki kemampuan Publikasi dan bisa mempublikasikan tulisannya pada website Cimahi Open Data/ Smartcity..

28. Pelaksanaan Monitoring Secara Berkala (Triwulan) terkait dengan Layanan Pengaduan dan Permohonan Informasi dengan Perangkat Daerah.
29. Peningkatan kapasitas penyelenggara Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.
30. Pengutan Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Cimahi.
31. Pendampingan pada 30 OPD dalam Implementasi Satu Data dan Statistik Sektoral.
32. Optimalisasi peran Diskominfo sebagai Walidata dalam Pengumpulan, Verifikasi dan Publikasi Data Kota Cimahi.
33. Peningkatan Ketersediaan dan Publikasi Data Berkualitas sesuai Prinsip Satu Data dan sesuai kebutuhan pengguna.
34. Peningkatan Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
35. Peningkatan Kolaborasi antara Walidata, Produsen Data dan Pembina Data dalam Ketersediaan Data dan Publikasi Data.
36. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Data di 30 OPD.

Perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024)

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.11. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
2	16	02			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Kota Cimahi	2.75	3,375,088,800	APBD
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	90%	1,814,983,300	APBD
2	16	03	2.01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	75	1,814,983,300	APBD
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	90	1,560,105,500	APBD
2	16	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	1	307,400,000	APBD
2	16	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kota Cimahi	1	594,205,500	APBD
2	16	03	2.02	0007	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kota Cimahi	3	438,500,000	APBD
2	16	03	2.02	0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	1	75,000,000	APBD
2	16	03	2.02	0009	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kota Cimahi	1	145,000,000	APBD

2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	65%	2,087,129,800	APBD
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	Kota Cimahi	84%	2,087,129,800	APBD
2	16	02	2.01	0005	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Cimahi	12	241,904,800	APBD
2	16	02	2.01	0006	<i>Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Cimahi	12	121,960,000	APBD
2	16	02	2.01	0007	<i>Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media</i>	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kota Cimahi	10	1,723,265,000	APBD
2	20		2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Kota Cimahi	47%	263,938,600	APBD
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Kota Cimahi	300	263,938,600	APBD
2	20	02	2.01	0001	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Cimahi	20	236,750,000	APBD
2	20	02	2.01	0002	<i>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Cimahi	60	27,188,600	APBD
2	21		2.01		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Kota Cimahi	50.00%	446,500,000	APBD
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Kota Cimahi	4	366,500,000	APBD
2	21	02	2.01	0002	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	2	86,500,000	APBD
2	21	02	2.01	0004	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Cimahi	20	280,000,000	APBD
2	21	02	2.02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah	Kota Cimahi	18	80,000,000	APBD

							daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;					
2	21	02	2.02	0001			Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Cimahi	5	80,000,000	APBD
2	16	02			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	74,50 (BB)	7,102,911,800	APBD
2	16	01					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Kota Cimahi	50.5			APBD
2	16	01					Nilai IKM Perangkat Daerah	Kota Cimahi	80,61			APBD
2	16	01	2.01			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Kota Cimahi	100%	70,000,000	APBD	
2	16	01	2.01	0001		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Cimahi	2	20,000,000	APBD	
2	16	01	2.01	0007		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Cimahi	16	50,000,000	APBD	
2	16	01	2.03			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;	Kota Cimahi	12	17,400,000	APBD	
2	16	01	2.03	0002		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi	5	17,400,000	APBD	
2	16	01	2.06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cimahi	12	233,922,800	APBD	
2	16	01	2.06	0004		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	40	20,403,200	APBD	
2	16	01	2.06	0005		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Cimahi	15	15,459,000	APBD	
2	16	01	2.06	0002		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	3	23,111,600	APBD	
2	16	01	2.06	0009		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	60	174,949,000	APBD	
2	16	01	2.08			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cimahi	12	90,800,000	APBD	
2	16	01	2.08	0001		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	16	41,000,000	APBD	

2	16	01	2.08	0002		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Cimahi	16	3,800,000	APBD
2	16	01	2.08	0004		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	16	46,000,000	APBD
2	16	01	2.09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Cimahi	12	124,000,000	APBD
2	16	01	2.09	0002		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Cimahi	5	49,000,000	APBD
2	16	01	2.09	0009		Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Cimahi	1	55,000,000	APBD
2	16	01	2.09	0010		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Cimahi	18	20,000,000	APBD
2	16	01	2.05			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Cimahi	100%	8,600,000	APBD
2	16	01	2.05	0010		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	40	8,600,000	APBD
2	16	01	2.02			Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Kota Cimahi	12	6,558,189,000	APBD
2	16	01	2.02	0001		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	34	6,523,189,000	APBD
2	16	01	2.02	0003		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Cimahi	18	35,000,000	APBD
JUMLAH										13.275.569.000	

B. Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian Renstra Dinas Komunikais dan Informatika Kota Cimahi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.12. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)/2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)/2022			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)/2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)/2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)/2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				1	2	3		4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,6		3	4,02	1,34	3,2	4,02	112%
						Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	92%		80%	90,48%	1,131		90,48%	98%
2	16	02			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	4,90	-	2,50	4,75	1,9	2,75	4,75	97%
2	16	03	2,01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	90%	-	90%	96,13%	1,067	90%	90%	100%

2	16	03	2,01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	77	-	75	75	1	75	75	97%
2	16	03	2,02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persen	95	-	85	85	1	90	90	95%
2	16	03	2,02	0001	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	-	1	1	1	1	1	25%
2	16	03	2,02	0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	-	1	1	1	1	1	100%
2	16	03	2,02	0007	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	12	-	3	3	1	3	3	25%
2	16	03	2,02	0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	4	-	1	1	1	1	1	25%
2	16	03	2,02	0009	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	4	-	1	1	1	1	1	25%
2	16	03	2,02	0015	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Dokumen	1							
2	16	03	2,02	0016	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	1							

2	16	03	2,02	0020	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	3								
2	16	03	2,02	0021	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	1								
2	16	03	2,02	0024	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	30								
2	16	03	2,02	0027	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi	15								
2	16	02		2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%		60%		1,67	65%	65%	65%	
									-		100%					
2	16	02	2,01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif		87%	-	82%	82%	1	84%	84%	97%	
2	16	02	2,01	0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	48	-	12	12	1	12	12	25%	
2	16	02	2,01	0006	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	48	-	12	12	1	12	12	25%	

2	16	02	2,01	0007	<i>Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media</i>	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	10	-	10	10	1	10	10	100%
2	16	02	2,01	0014	<i>Relasi Media</i>	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Aktivitas	12							
2	16	02	2,01	0017	<i>Pelayanan Informasi Publik</i>	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pemohonan	84							
2	16	02	2,01	0023	<i>Penyusunan Konten</i>	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1000							
2	20				URUSAN STATISTIK	Indeks Pembangunan Statistik			-	2	2,53	1,265			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persen	100%		37%	100%	2,70	47%	100%	100%
2	20	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Data Set	1400	-	250	830	3,32	300	300	21%
2	20	02	2,01	0001	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	20	-	20	20	1	20	20	100%
2	20	02	2,01	0002	<i>Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</i>	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	270	-	45	45	1	60	60	22%
2	20	02	2,01	0007	<i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</i>	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	180							

2	20	02	2,01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	20							
					URUSAN PERSANDIAN	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	400	-	351	409	1,16	351	351	88%
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	100%	-	33,33%	100%	3	50,00%	100,00%	100%
2	21	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Persen	6	-	3	40	13,33	4	4	67%
2	21	02	2,01	0002	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	10	-	1	1	1	2	2	20%
2	21	02	2,01	0004	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	30	-	15	15	1	20	20	67%
2	21	02	2,02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Persen	30	-	10	15	1,5	10	10	33%
2	21	02	2,02	0001	<i>Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	20	-	1	30	30	1	1	5%

					NON URUSAN	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		56,50	-	55	86,93	1,58	55,50	86,93	154%
2	16	02			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai Angka	81 (A)	-	71,00	80	1,13	74,50 (BB)	80,00	88%
						Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Angka	79,68	-	50,00	76,6	1,532	50,50	76,6	96%
						Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai Angka	84,92	-	76,61	84,72	1,11	80,61	84,72	100%
2	16	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Persen	100%	-	100%	100	100	100%	100%	100%
2	16	01	2,01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	9	-	2	2	1	2	2	22%
2	16	01	2,01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	64	-	16	16	1	16	16	25%
2	16	01	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;		48	-	12	12	1	12	12	25%
2	16	01	2,03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	20	-	5	5	1	5	5	25%
2	16	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	-	12	12	1	12	12	25%
2	16	01	2,06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	160	-	40	40	1	40	40	25%
2	16	01	2,06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	-	15	15	1	15	15	25%
2	16	01	2,06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	-	3	3	1	3	3	25%
2	16	01	2,06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,35	-	50	50	1	60	50	2128%

2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12							
					<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1							
2	16	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	48	-	12	12	1	12	12	25%
2	16	01	2,08	0001	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	64	-	16	16	1	16	16	25%
2	16	01	2,08	0002	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	64	-	16	16	1	16	16	25%
2	16	01	2,08	0004	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	64	-	16	16	1	16	16	25%
2	16	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	48	-	12	12	1	12	12	25%
2	16	01	2,09	0002	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	-	5	5	1	5	5	25%
2	16	01	2,09	0009	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	-	1	1	1	1	1	25%
2	16	01	2,09	0010	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	71	-	15	15	1	15	15	21%

2	16	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100	-	100	100	1	100	100	100%
2	16	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	37							
2	16	01	2,05	0010	<i>Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	-	40	40	1	40	40	100%
2	16	01	2,05	0011	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	11							
2	16	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Dokumen	48	-	12	12	1	12	12	25%
2	16	01	2,02	0001	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	136	-	34	34	1	34	34	25%
2	16	01	2,02	0003	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	-	18	18	1	18	18	25%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2.12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi			
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	3,00	3,20	3,40	3,60	3,09	4,02	3,00	3,20	3,40	3,60
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	-	-	80%	84%	88%	92%	73	90,48	80%	84%	88%	92%
3	Indeks Pembangunan Statistik	-	-	2,00	3,00	3,00	4,00	N/A	2,53	2,00	3,00	3,00	4,00
4	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-	-	351	370	390	400	386	409	351	370	390	400
5	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	55,00	55,50	56,00	56,50	78,71	86,93	55,00	55,50	56,00	56,50

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kesiapan dan kinerja pemerintah dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan. Ini adalah alat yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah telah bergerak menuju transformasi digital dalam menyelenggarakan layanan publik, mengelola data, dan berkomunikasi dengan masyarakat.

SPBE bertujuan untuk mendorong pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat melalui penggunaan TIK.

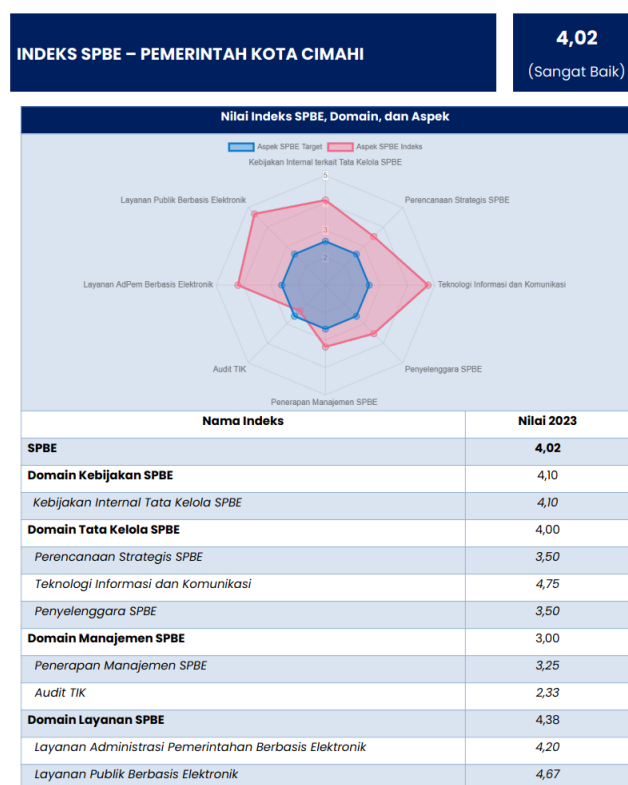
Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi. Indeks SPBE pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,00. Berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi capaian SPBE Kota Cimahi sebesar 4,02 dengan predikat sangat baik, sehingga tingkat capaian kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 sudah melebihi harapan/target yaitu sebesar 134% (sangat baik).

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi SPBE Kota Cimahi Tahun 2023, raihan dan kurva indeks SPBE Pemerintah Kota Cimahi adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1 Indeks SPBE Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023



Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan dan transparansi informasi publik yang disediakan oleh pemerintah. Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pemerintah mengungkapkan data, informasi, dan kebijakan kepada masyarakat, bisnis, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik merujuk pada praktik pemerintah yang mengutamakan akses terbuka dan bebas terhadap data, dokumen, dan informasi yang relevan bagi masyarakat umum. Ini mencakup data kebijakan, data anggaran, data administratif, dan informasi lainnya yang relevan dengan tindakan dan keputusan pemerintah yang memiliki kriteria sebagai dokumen atau informasi publik. Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik untuk mengukur tingkat keterbukaan pemerintah dan transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 80, berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan peringkat penerapan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2023 sebesar 90,48 dengan kualifikasi Informatif. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik mencapai 113,10% sehingga capaian kinerja Indeks keterbukaan Informasi Publik tercapai melebihi harapan dengan predikat sangat baik.

Indeks Pembangunan Statistik merupakan alat yang digunakan untuk mengukur perkembangan dan kinerja sektor statistik. Ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebaran data statistik, yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pemantauan progres pembangunan nasional. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Statistik di Indonesia:

Indeks Pembangunan Statistik mencakup aspek:

1. Kualitas data, yaitu keakuratan dan kualitas data statistik yang dihasilkan.
2. Pengolahan data, yaitu kemampuan lembaga statistik dalam mengolah data secara efisien dan handal.
3. Analisis, kemampuan dalam melakukan analisis data yang mendalam.

4. Diseminasi data, sejauh mana data statistik disebarkan secara luas dan mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
5. Sumber daya manusia menilai kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam statistik.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

Target IPS pada tahun 2023 sebesar 2,00 dan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sebesar 2,53 dengan kategori Cukup sehingga capaian indikator sebesar 126,50% (sangat baik) melebihi harapan.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan informasi dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Indeks ini bertujuan untuk menilai sejauh mana organisasi telah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data dan informasi penting mereka dari ancaman keamanan, termasuk peretasan, kehilangan data, dan pelanggaran keamanan.

Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai dan memantau tingkat kesiapan dan efektifitas kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan informasi dan dirancang untuk membantu organisasi memahami risiko keamanan informasi dan untuk meningkatkan tingkat perlindungan yang ada.

Sasaran meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah diukur menggunakan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Indeks (KAMI) merupakan alat untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka

kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Evaluasi dilakukan terhadap sebagai berbagai area yang menjadi target penerapan kewanmanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memnuhi semua aspek kewanmanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013.

Pada Tahun 2023 Indeks KAMI yang ditargetkan adalah 351 dan hasil penilaian yang telah dilakukan sebesar 409 dengan demikian capaian sasaran meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah tercapai melampaui target sebesar 116,52% (sangat baik).

Indeks Reformasi Birokrasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan efektivitas reformasi birokrasi dalam suatu pemerintahan. Reformasi birokrasi adalah serangkaian langkah dan upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Indeks ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah telah berhasil mengimplementasikan reformasi birokrasi.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Penilaian Indeks RB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023 sampai dengan penyusunan LKIP ini belum diperoleh hasil oleh karena itu pengukuran kinerja menggunakan hasil tahun 2022 sebesar 78,71, maka capaian kinerja tercapai melebihi harapan dengan capaian sebesar 143,11% (sangat baik).

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melaksanakan 3 urusan yang menjadi kewenangan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik. Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis layanan, yaitu:

a. Layanan Publik Secara Langsung

Terdiri dari : Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Informasi, Layanan Publikasi

b. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

Terdiri dari : Layanan Data Statistik, Layanan Publikasi, Layanan Dokumentasi, Layanan Aplikasi TIK, Layanan Infrastruktur Jaringan TIK, Layanan Persandian.

Kinerja masing-masing layanan tersebut didukung oleh beberapa aspek kinerja, sehingga untuk mengevaluasi kinerja layanan tersebut dilakukan analisa terhadap capaian indikator masing-masing aspeknya. Capaian kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai berikut:

A. Layanan Publik Secara Langsung

a. Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat dilakukan melalui aplikasi PESDUK (Pesan Penduduk), layanan surat baik elektronik maupun fisik, pengaduan langsung dan pengaduan melalui media massa. Secara umum layanan Pengaduan Masyarakat cukup baik karena hampir semua pengaduan selalu direspon oleh pengelola. Namun kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah pada tindak lanjut terhadap masalah yang disampaikan oleh masyarakat yaitu tidak terkontrolnya penanganan permasalahan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu layanan Pengaduan Masyarakat belum

terintegrasi dengan instansi/lembaga Pemerintah instansi vertikal antara lain kepolisian, BPN, Kementerian Agama, BPS.

b. Layanan Informasi

Layanan Informasi, secara fisik telah mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya renovasi loket pelayanan. Layanan ini didukung oleh Tim PPID Kota Cimahi yang terdiri dari PPID Utama yaitu Kepala Bidang IKPS Dinas Komunikasi dan Informatika dan PPID Pembantu yaitu Sekretaris Perangkat Daerah Kota Cimahi. Kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah:

1. Belum adanya SOP untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi pada PPID Kota Cimahi
2. Pengetahuan terkait Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi yang dirasa masih kurang pada PPID Pembantu di tiap Perangkat Daerah.
3. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kota Cimahi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
4. Informasi pada website Pemerintah Kota Cimahi kurang *ter-update*

c. Layanan Publikasi

Layanan Publikasi dilaksanakan melalui media sosial dan kerjasama dengan media massa. Layanan publikasi melalui media sosial terdapat 2 yaitu Facebook dan Instagram. Publikasi melalui media sosial meliputi publikasi kegiatan-kegiatan Kepala Daerah, capaian-capaian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta program-program prioritas. Sedangkan publikasi melalui media massa meliputi berbagai media koran/majalah, media *online*, media radio dan media

televisi. Publikasi melalui media massa meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi. *Pers release* dilakukan untuk program-program prioritas Pemerintah Kota Cimahi.

Kendala yang dihadapi dalam layanan publikasi, sebagai berikut:

1. Publikasi melalui media sosial mempunyai kecenderungan terfokus pada aktivitas Kepala Daerah dan kurang didukung oleh narasi tentang pembangunan.
2. Publikasi melalui media sosial kurang mendapat respon dari masyarakat karena kecenderungan komunikasi yang dilakukan hanya satu arah yaitu respon dari masyarakat tidak diberikan tanggapan karena tidak didukung dengan tim melainkan hanya dilaksanakan oleh operator.
3. Tidak ada *feedback* dari analisis berita yang dilakukan sebagai bahan penyusunan perencanaan publikasi.

B. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

a. Layanan Data Statistik

Untuk Layanan Data Statistik, pada tahun 2017 telah dibangun aplikasi OPEN DATA sebagai sarana publikasi data statistik sektoral Pemerintah Kota Cimahi. Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mempunyai tugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Kendala yang dihadapi dalam layanan Data Statistik adalah:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral antara “Bappeda dengan Diskominfo;

2. Pengelola Data pada PD dibebani pekerjaan pengumpulan data dari berbagai instansi (Bappeda, Setda, Kominfo, Instansi Vertikal) sehingga tidak fokus;
 3. Pemahaman tentang statistik sektoral masih rendah dan masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Statistik, kemampuan analisis dan grafis;
 4. Penggunaan *Platform* yang berbeda pada aplikasi yang dibangun perangkat daerah sehingga menghambat proses integrasi.
- b. Layanan Dokumentasi
- Layanan Dokumentasi dilakukan hanya kegiatan pimpinan kepala daerah.
- c. Layanan Aplikasi TIK
- Layanan Aplikasi TIK meliputi layanan domain dan subdomain, pengelolaan/kontrol aplikasi-aplikasi PD, pendampingan pembangunan aplikasi PD dan integrasi aplikasi-aplikasi PD.
- d. Layanan Infrastruktur Jaringan TIK
- Seluruh Perangkat Daerah di lingkup perkantoran Pemkot Cimahi telah tersambung dengan sambungan intranet. Sedangkan yang di luar lingkup perkantoran Pemkot Cimahi menggunakan jaringan *Fiber Optic*. Belum seluruhnya kantor layanan tersambung dengan *fiber optic* melainkan menggunakan saluran VPN. Kendala dalam layanan infrastruktur jaringan TIK yaitu:
1. Pusat Data/Data Centre belum memadai dan bercampur dengan ruang kerja administrasi.
 2. Penggelaran Jaringan *Fiber Optic* belum menyeluruh sesuai dengan perencanaan.
 3. Implementasi dan Optimalisasi Jaringan CCTV untuk kepentingan implementasi *Smart City* belum dilakukan.

4. Belum lengkapnya perangkat pendukung kinerja jaringan baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta perangkat pengamanan jaringan di dalamnya.
5. Adanya ancaman akan keamanan jaringan yang terus meningkat yang harus segera diantisipasi segera.
6. Belum tersediannya kebijakan, standard dan prosedur.

e. Layanan Persandian

Layanan persandian meliputi layanan keamanan informasi, sertifikasi elektronik dan layanan persandian. Kendala yang dihadapi dalam layanan persandian adalah:

1. Kategori Sistem Elektronik tinggi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi membutuhkan minimal tingkat kematangan tata kelola yang Terdefinisi dan Konsisten (tingkat III) dengan kelengkapan control keamanan yang cukup lengkap. Mengacu pada hasil penilaian mandiri dengan menggunakan instrument Indeks KAMI, tingkat kematangan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi baru ditingkat Penerapan Kerangka Kerja Dasar (tingkat II) dengan kelengkapan kontrol keamanan yang perlu perbaiki
2. Belum adanya dokumen perencanaan strategis persandian dan keamanan informasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan program/kegiatan bidang persandian dan keamanan informasi
3. Belum ada proses penilaian kinerja keamanan informasi untuk mengukur tingkat ketercapaiannya terhadap sasaran keamanan informasi
4. Kebijakan tata kelola keamanan informasi sudah ada, namun masih belum disesuaikan dengan regulasi maupun standar yang terbaru

5. SOP keamanan informasi yang ada saat ini belum memenuhi semua kebutuhan organisasi, dan masih mengacu pada regulasi maupun standar lama
6. Kurang optimalnya layanan persandian dan keamanan informasi karena belum tersediaannya sarana dan prasarana pendukung
7. *Security*, Keamanan Aplikasi yang telah dibangun, Keamanan Akses Jaringan Internet maupun Intranet dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi disetiap SKPD;

Pada Tahun Anggaran 2023 kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi secara umum rata melebihi target dengan rata-rata capaian sebesar 126,65%. Pencapaian Kinerja ini dicapai dengan komitmen bersama yang kuat dan kerja keras seluruh elemen organisasi dari mulai pucuk pimpinan hingga lapisan paling bawah.

Dengan lompatan capaian kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2023 dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian target pada tahun perencanaan 2025. Penyesuaian target untuk rencan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dilakukan dengan telaahan dan analisis terlebih dahulu melalui reviu Rencana Strategis Tahun 2023-2036. Penyesuaian target dilakukan terhadap Indikator Kinerja Kunci dan Program sebagai berikut:

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan rekomendasi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2023 terdapat beberapa capaian yang melampaui target bahkan melebihi target rencana tahun 2025, indikator kinerja utama yang telah melampaui target sebagai berikut:

Tabel 2.13. Perbandingan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.00	4,02	3.20		3.40		3.60	
2	Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80%	90,48%	84%		88%		90%	
3	Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	2	2,53	3		3		4	
4	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	370		390		400	
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	78,71	55,5		56		56,5	

Berdasarkan capaian tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian rencana target untuk tahun anggaran 2024 s.d. 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.14 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran							
				Pada Tahun Ke							
				2023		2024		2025		2026	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.00	4,02	4,10		4.15		4,2	
			Indeks Keterbukaan	80%	90,48%	90,75%		90,90%		91,00%	

			Informasi Publik							
			Indeks Pembangunan Statistik	2	2,53	3		3,01		3,10
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351	409	410		412		415
			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55	86,93	86,96		86,98		89,00

Selain perubahan IKU diskominfo, terdapat beberapa kinerja Program yang telah melampau target pada tahun 2023 sehingga dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 2.15 Perubahan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	2		3	4	5	6	7
I	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatkan penyelenggaraan e-Government	Tingkat kematangan teknologi informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,5	4,75	4,80	4,90
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah dan komunikasi publik yang efektif dan efisien	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	60	100	100	100

			pemerintah daerah kabupaten/kota				
III	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya tata Kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37	100	100	100
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33	100	100	100
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Sakip Perangkat Daerah	71	74,5	78	80
			Indeks Profesionalitas ASN	50	79,48	79,58	79,68
			Nilai IKM Perangkat Daerah	76,61	84,72	84,82	84,92

Menindaklanjuti diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa terdapat beberapa sub kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan yang sebelumnya telah digunakan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi tupoksi Diskominfo mengalami perubahan. Oleh karena itu agar keberlangsungan pelayanan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

dislenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi terus dapat terus berjalan maka, perlu dilakukan penyesuaian/penyesuaian terhadap beberapa Nomentklatur, Indikator, target dan penambahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.16 Perubahan Sub Kegiatan dan Terget Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
No	Sub Kegiatan	Indikator	No	Sub Kegiatan	Indikator
1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik
2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
3	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	3	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata
5	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik
6	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
7	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	

8	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola</i>	8	Pengelolaan Pusat Kendali Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional</i>
9	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	9	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	<i>Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</i>
10	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	<i>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>	10	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	<i>Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</i>
11	Pengembangan dan PKota Cerdas dan Kota Cerdas/engelolaan Ekosistem Kabupaten	<i>Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City</i>	11	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	<i>Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas</i>

Hasil monitoring dan evaluasi Rencana Kerja serta konsultasi dengan Bapelitbangda Kota Cimahi, untuk mendukung prioritas kebijakan Kota Cimahi serta mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran diperlukan adanya penambahan sub kegiatan baru yang terdiri dari:

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN sehingga mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, untuk meningkatkan kinerja dan mobilitas Kepala Dinas.
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting terkait urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut:

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang telah mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE Nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum serta menetapkan manajemen SDM, manajemen risiko dan manajemen perubahan. Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab pada perancangan dan pengimplementasian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab pada domain Layanan yang menyangkut urusan penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

b. Portal Satu Data Indonesia

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;

3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

c. Command Centre

Dalam rangka “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” Provinsi Jawa Barat akan membangun *Command Centre* untuk seluruh Kota/Kabupaten Jawa Barat dalam waktu 5 tahun, dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Pemberian bantuan diberikan secara bertahap tergantung pada kesiapan Kota/Kabupaten. *Command Center (Smart Digital Government Di Kabupaten/Kota)*, akan berfungsi sebagai sarana Monitoring Kinerja Perangkat daerah, *Monitoring* Laporan Lapangan secara *real time*, Penyajian Informasi Eksekutif, *Video Conference*, dan Presentasi.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2025 menyatakan bahwa tema pembangunan Tahun 2025 adalah

“Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia “.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan dan prioritas-prioritas yang telah dikemukakan sebelumnya pada RPJMN 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, RPJPD Kota Cimahi 2005-2025 serta permasalahan dan isu-isu strategis Kota Cimahi selama periode RPD 2023-2026, maka ditetapkanlah 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota;
2. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman;
3. Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi;
4. Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi;
5. Optimalisasi potensi pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan;
7. Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial;
8. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana; dan
9. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik maka secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi menjadi bagian dari upaya mendukung prioritas 9 yaitu Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik yakni melalui layanan pengaduan masyarakat, layanan informasi, publikasi pembangunan dan pemerintahan, layanan penyelenggaraan elektronik *government* dan layanan pengelolaan data statistik.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam table berikut:

Tabel. 2.17 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Cimahi	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	4,80	4.541.795.760	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Cimahi	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	4,80	Rp 4.541.795.760	
1.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0%	Rp -	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0%	Rp -	
1.1.1	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Kota Cimahi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0	Rp -	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	Kota Cimahi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0	Rp -	
1.2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	90	Rp 4.541.795.760	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	90	Rp 4.541.795.760	
1.2.1	<i>Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	<i>Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	
1.2.1	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	Kota Cimahi	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	0	0	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	Kota Cimahi	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	0	0	
1.2.3	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	Kota Cimahi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	0	0	<i>Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses</i>	Kota Cimahi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	0	0	

								Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			
1.2.4		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Cimahi	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0	0		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Cimahi	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0	0	
1.2.5		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	0	0		Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	0	0	
1.2.6		Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	Rp 293.664.000		Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1	Rp 293.664.000	
1.2.7		Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1	Rp 695.350.300		Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1	Rp 695.350.300	
1.2.8		Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Cimahi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3	Rp 521.481.000		Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Cimahi	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3	Rp 521.481.000	
1.2.9		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	Rp 15.807.000		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	Rp 15.807.000	
1.2.10		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Cimahi	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30	Rp 2.863.703.560		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Cimahi	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	30	Rp 2.863.703.560	
1.2.11		Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Cimahi	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	15	Rp 151.789.900		Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kota Cimahi	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	15	Rp 151.789.900	

2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Kota Cimahi	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65%	Rp 3.936.642.600	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Kota Cimahi	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65%	Rp 3.936.642.600	
2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Cimahi	Persentase analisis berita yang berkonten positif	84%	Rp 3.936.642.600	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Cimahi	Persentase analisis berita yang berkonten positif	84%	Rp 3.936.642.600	
2.1.1		Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
2.1.2		Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			
2.1.3		Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Cimahi	Jumlah Layanan Hubungan Media				Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Kota Cimahi	Jumlah Layanan Hubungan Media			
2.1.4	Relasi Media		Kota Cimahi	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12	Rp 2.924.001.600	Relasi Media		Kota Cimahi	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12	Rp 2.924.001.600	
2.1.5	Pelayanan Informasi Publik		Kota Cimahi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	84	Rp 803.020.000	Pelayanan Informasi Publik		Kota Cimahi	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	84	Rp 803.020.000	
2.1.6	Penyusunan Konten		Kota Cimahi	Jumlah Konten Informasi Publik	1000	Rp 209.621.000	Penyusunan Konten		Kota Cimahi	Jumlah Konten Informasi Publik	1000	Rp 209.621.000	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Kota Cimahi	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	47%	Rp 466.565.850	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Kota Cimahi	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	47%	Rp 466.565.850	
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kota Cimahi	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	300	Rp 466.565.850	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kota Cimahi	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	300	Rp 466.565.850	

3.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	Rp -		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0	Rp -	
3.3		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Cimahi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0	Rp -		Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Cimahi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0	Rp -	
3.4		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180	Rp 71.332.000		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Cimahi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	180	Rp 71.332.000	
3.5		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	20	Rp 395.233.850		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kota Cimahi	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	20	Rp 395.233.850	
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Cimahi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	100,00%	Rp 689.160.000		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Cimahi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	100,00%	Rp 689.160.000	
4.1		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	5	Rp 468.310.000		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	5	Rp 468.310.000	
4.1.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	Rp 171.534.000		Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	Rp 171.534.000	
4.1.2		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25	Rp 296.776.000		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	25	Rp 296.776.000	
4.2		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	25	Rp 220.850.000		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	25	Rp 220.850.000	

4.2.1		Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10	Rp 220.850.000		Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10	Rp 220.850.000	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Cimahi	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	78 (BB)	Rp 7.651.106.120	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kota Cimahi	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	78 (BB)	Rp 7.651.106.120	
			Kota Cimahi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	79,58				Kota Cimahi	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	79,58		
			Kota Cimahi	Nilai IKM Perangkat Daerah	85				Kota Cimahi	Nilai IKM Perangkat Daerah	85		
5.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Cimahi	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100%	Rp 140.317.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Cimahi	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100%	Rp 140.317.000	
5.1.1.		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Rp 114.975.000		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2	Rp 114.975.000	
5.1.2.		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	Rp 25.342.000		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	Rp 25.342.000	
5.2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Cimahi	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;	12	Rp 20.942.180	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kota Cimahi	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;	12	Rp 20.942.180	
5.2.1		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Rp 20.942.180		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Rp 20.942.180	
5.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Rp 304.406.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Rp 304.406.000	
5.3.1		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp 54.662.000		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp 54.662.000	
5.3.2		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Rp 55.641.000		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	Rp 55.641.000	
5.3.3		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Rp 19.244.000		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	Rp 19.244.000	
5.3.4		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Rp 174.859.000		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Rp 174.859.000	
5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Cimahi	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 600.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kota Cimahi	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 600.000.000	

5.4.1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cimahi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Rp 600.000.000		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Cimahi	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Rp 600.000.000	
5.5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Rp 158.019.000		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	Rp 158.019.000	
5.5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16	Rp 60.000.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16	Rp 60.000.000	
5.5.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16	Rp 3.800.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16	Rp 3.800.000	
5.5.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	Rp 94.219.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	Rp 94.219.000	
5.5.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12	Rp 274.747.000		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12	Rp 274.747.000	
5.5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Rp 150.022.000		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Rp 150.022.000	
5.5.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp 95.475.000		Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Rp 95.475.000	
5.5.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Rp 29.250.000		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	Rp 29.250.000	
5.6.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	100%	Rp 343.216.000		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	100%	Rp 343.216.000	
5.6.1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37	Rp 21.600.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Cimahi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37	Rp 21.600.000	

5.6.2		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Rp 167.726.000		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Rp 167.726.000	
5.6.3		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11	Rp 153.890.000		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11	Rp 153.890.000	
5.7		Kegiatan Administrasi Keuangan	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	12	Rp 5.809.458.940		Kegiatan Administrasi Keuangan	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	12	Rp 5.809.458.940	
5.7.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Rp 5.788.828.940		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Rp 5.788.828.940	
5.7.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18	Rp 20.630.000		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18	Rp 20.630.000	
Jumlah						17.285.270.330						17.285.270.330	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kota Cimahi Tahun 2024, secara umum masyarakat Kota Cimahi mengharapkan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui layanan berbasis elektronik sehingga mempermudah akses bagi seluruh masyarakat. Sedangkan dari hasil Forum Perangkat Daerah yang melibatkan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang terkait dengan urusan-urusan dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi bahwa masyarakat Kota Cimahi pada hakekatnya mengharapkan peningkatan kinerja semua urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut usulan-usulan dari pemangku kepentingan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi untuk Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.18 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Usulan	Aktivitas
1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Cimahi	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 layanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik sehingga mudah diakses, cepat dan handal (LPM Kelurahan Cibeureum)	1. Penguatan Kebijakan SPBE (Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sesuai dengan Aplikasi SIA SPBE Kemenpan RB)
2	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Cimahi	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 aplikasi		2. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Penyediaan Backup Link Jaringan WAN, Peremajaan Perangkat Aktif Jaringan, Penambahan Kapasitas Bandwidth, Penambahan Titik Wifi Publik, Integrasi Jaringan CCTV), sebagai solusi untuk layanan jaringan ke OPD yang sering terputus
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Pusat Data		3. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pusat

4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75 Perangkat daerah		Data Pemerintah Daerah (Peremajaan dan Penambahan Kapasitas Server, optimalisasi Backup Server dan Pusat Data Nasional) untuk memenuhi peningkatan performance dan kebutuhan penyimpanan data yang terus bertambah 4. Pelaksanaan Audit TIK 5. Pengembangan Kompetensi SDM TIK 6. Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 7. Peningkatan Tingkat Kematangan Aplikasi Layanan Publik 8. Peningkatan interoperabilitas antar aplikasi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLD) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) 9. Pembangunan aplikasi layanan Publik dan Administrasi Pemerintah Berbasis SSO (SIBANGJAKA, PMKS, SIMRENDIA, SIMAK), Pengintegrasian Aplikasi Layanan Publik Berbasis SSO POLAKAMI (Sidakeptri, Piramida, BPHTB), Pengembangan Modul Dashboard Eksekutif 10. Penguatan dan Peningkatan Kolaborasi Tim Koordinasi SPBE
5	Sub Kegiatan Realsi Media	Kota Cimahi	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 dokumen	1. Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan di Kota Cimahi (PWI Kota Cimahi). 2. Dukungan untuk publikasi kegiatan strategis di perangkat daerah (Perwakilan Perangkat Daerah)	1. Penyediaan anggaran bagi Uji Kompetensi Wartawan bagi wartaawan di Kota Cimahi yang memenuhi persyaratan. 2. Pembentukan PIC di seluruh perangkat daerah untuk memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan strategis perangkat daerah agar dapat tersampaikan melalui publikasi media Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi
6	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Fasilitasi pengembangan Relawawn TIK Kota Cimahi (Relawan TIK Kota Cimahi).	Penguatan dan Pembinaan Relawan TIK dan Forum Usaha Relawan TIK Kota Cimahi sebagai Mitra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Infrastruktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arahan Pembangunan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Visi, Misi dan Agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang mengarah pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Misi, tujuan, sasaran dan target indikator utama (IKU) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah:

Tabel 3.1. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Misi Kota Cimahi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
				Uraian	Target
I	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,15
		Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	90,90 %
		Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	3.01
		Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	412
		Meningkatkan tata kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	86,98

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2025 sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 terdiri dari terdiri dari 5 program, 13 kegiatan. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan yang diharapkan dalam mendukung pencapaian visi misi Kota Cimahi sebagai berikut:

1. Optimalisasi peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Optimalisasi peningkatan keterbukaan informasi publik.

3. Peningkatan kualitas data statistik sektoral di Kota Cimahi.
4. Peningkatan keamanan sistem informasi lingkup Kota Cimahi.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Penjelasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 Berdasarkan Rencana Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026

**Indikasi Rencana Program dan Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kota Cimahi	4,15				4,20	
						Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kota Cimahi	90,90				91,00	
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	86,98				87,00	
2	16	02			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Kota Cimahi	4,80	4.541.795.760	APBD		4,90	4.768.885.548
2	16	03	2,01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	0%	-	APBD		0%	-
2	16	03	2,01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	0	-	APBD		0	-
2	16	03	2,02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	90	4.541.795.760	APBD		95	4.768.885.548
2	16	03	2,02	0001	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	0	0	APBD		0	0

2	16	03	2,02	0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kota Cimahi	0	0	APBD	0	0
2	16	03	2,02	0007	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kota Cimahi	0	0	APBD	0	0
2	16	03	2,02	0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	0	0	APBD	0	0
2	16	03	2,02	0009	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kota Cimahi	0	0	APBD	0	0
2	16	03	2,02	0015	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Cimahi	1	293.664.000	APBD	1	308.347.200
2	16	03	2,02	0016	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Kota Cimahi	1	695.350.300	APBD	1	730.117.815
2	16	03	2,02	0020	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Cimahi	3	521.481.000	APBD	3	547.555.050
2	16	03	2,02	0021	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	1	15.807.000	APBD	1	16.597.350
2	16	03	2,02	0024	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Cimahi	30	2.863.703.560	APBD	30	3.006.888.738
2	16	03	2,02	0027	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Cimahi	15	151.789.900	APBD	15	159.379.395
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	100%	3.936.642.600	APBD	100%	4.133.474.730
2	16	02	2,01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	Kota Cimahi	84%	3.936.642.600	APBD	86%	4.133.474.730
2	16	02	2,01	0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Cimahi			APBD	0	0
2	16	02	2,01	0006	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Cimahi			APBD	0	0

2	16	02	2,01	0007	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kota Cimahi			APBD		0	0
2	16	02	2,01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Cimahi	12	2.924.001.600	APBD		0	3.070.201.680
2	16	02	2,01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Cimahi	84	803.020.000	APBD		0	843.171.000
2	16	02	2,01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kota Cimahi	1000	209.621.000	APBD		0	220.102.050
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Indeks Pembangunan Statistik	Kota Cimahi	3,01					
2	20		2,01		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Kota Cimahi	100%	466.565.850	APBD		100%	489.894.143
2	20	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Kota Cimahi	300	466.565.850	APBD		350	489.894.143
2	20	02	2,01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Cimahi	0	-	APBD		0	-
2	20	02	2,01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Cimahi	0	-	APBD		0	-
2	20	02	2,01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Cimahi	180	71.332.000	APBD		180	74.898.600
2	20	02	2,01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kota Cimahi	20	395.233.850	APBD		20	414.995.543
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Kota Cimahi	412					
2	21		2,01		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Kota Cimahi	100,00%	689.160.000	APBD		100,00%	568.525.500
2	21	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Kota Cimahi	5	468.310.000	APBD		6	491.725.500

2	21	02	2,01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	3	171.534.000	APBD	4	180.110.700
2	21	02	2,01	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Cimahi	25	296.776.000	APBD	30	311.614.800
2	21	02	2,02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Kota Cimahi	25	220.850.000	APBD	30	76.800.000
2	21	02	2,02	0001	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Cimahi	10	220.850.000	APBD	20	76.800.000
2	16	02			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	80 (BB)	7.651.106.120	APBD	80 (BB)	7.346.266.326
2	16	01				Indeks Profesionalitas ASN	Kota Cimahi	79,58		APBD	79,68	-
2	16	01				Nilai IKM Perangkat Daerah	Kota Cimahi	84,82		APBD	84,92	
2	16	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Kota Cimahi	100%	140.317.000	APBD	100%	147.332.850
2	16	01	2,01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Cimahi	2	114.975.000	APBD	2	120.723.750
2	16	01	2,01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Cimahi	16	25.342.000	APBD	16	26.609.100
2	16	01	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;	Kota Cimahi	12	20.942.180	APBD	12	21.989.289
2	16	01	2,03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi	5	20.942.180	APBD	5	21.989.289
2	16	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cimahi	12	304.406.000	APBD	12	262.231.200
2	16	01	2,06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	3	54.662.000	APBD	3	220.985.136
2	16	01	2,06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	40	55.641.000	APBD	40	58.423.050
2	16	01	2,06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Cimahi	15	19.244.000	APBD	15	20.206.200
2	16	01	2,06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	60	174.859.000	APBD	65	183.601.950

2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi		600.000.000					-
					<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Cimahi	1	600.000.000	APBD				
2	16	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cimahi	12	158.019.000	APBD		12		165.919.950
2	16	01	2,08	0001	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	16	60.000.000	APBD		16		63.000.000
2	16	01	2,08	0002	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Cimahi	16	3.800.000	APBD		16		3.990.000
2	16	01	2,08	0004	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	16	94.219.000	APBD		16		98.929.950
2	16	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Cimahi	12	274.747.000	APBD		12		288.484.350
2	16	01	2,09	0002	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Cimahi	5	150.022.000	APBD		5		157.523.100
2	16	01	2,09	0009	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Cimahi	1	95.475.000	APBD		1		100.248.750
2	16	01	2,09	0010	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Cimahi	18	29.250.000	APBD		18		30.712.500
2	16	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Cimahi	100%	343.216.000	APBD		100		360.376.800
2	16	01	2,05	0002	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Cimahi	37	21.600.000	APBD		37		22.680.000
2	16	01	2,05	0010	<i>Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	40	167.726.000	APBD		45		176.112.300
2	16	01	2,05	0011	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	11	153.890.000	APBD		11		161.584.500
2	16	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Kota Cimahi	12	5.809.458.940	APBD		12		6.099.931.887
2	16	01	2,02	0001	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	34	5.788.828.940	APBD		34		6.078.270.387
2	16	01	2,02	0003	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Cimahi	18	20.630.000	APBD		18		21.661.500

Jumlah	17.285.270.330				17.307.046.247
--------	----------------	--	--	--	----------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam mendukung pencapaian kinerja pada tahun 2025 direncanakan dilakukan melalui 5 Program, 13 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 17.285.270.330 (tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh rupiah). Berikut disajikan rincian rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

Tabel rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1					2	3	4	5	6	7	8
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kota Cimahi	4,15			
						Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kota Cimahi	90,90			
						Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Cimahi	86,98			
2	16	02			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Kota Cimahi	4,80	4.541.795.760	APBD	
2	16	03	2,01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	0%	-	APBD	
2	16	03	2,01	0003	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	0	-	APBD	
2	16	03	2,02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	90	4.541.795.760	APBD	
2	16	03	2,02	0001	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	0	0	APBD	
2	16	03	2,02	0003	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kota Cimahi	0	0	APBD	

2	16	03	2,02	0007	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kota Cimahi	0	0	APBD	
2	16	03	2,02	0008	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	0	0	APBD	
2	16	03	2,02	0009	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Kota Cimahi	0	0	APBD	
2	16	03	2,02	0015	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Cimahi	1	293.664.000	APBD	
2	16	03	2,02	0016	Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Kota Cimahi	1	695.350.300	APBD	
2	16	03	2,02	0020	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Cimahi	3	521.481.000	APBD	
2	16	03	2,02	0021	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	1	15.807.000	APBD	
2	16	03	2,02	0024	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Cimahi	30	2.863.703.560	APBD	
2	16	03	2,02	0027	Sub Kegiatan Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Cimahi	15	151.789.900	APBD	
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	65%	3.936.642.600	APBD	
2	16	02	2,01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	Kota Cimahi	84%	3.936.642.600	APBD	
2	16	02	2,01	0005	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Cimahi			APBD	
2	16	02	2,01	0006	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kota Cimahi			APBD	
2	16	02	2,01	0007	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kota Cimahi			APBD	

2	16	02	2,01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Cimahi	12	2.924.001.600	APBD	
2	16	02	2,01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Cimahi	84	803.020.000	APBD	
2	16	02	2,01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kota Cimahi	1000	209.621.000	APBD	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Indeks Pembangunan Statistik	Kota Cimahi	3,01			
2	20		2,01		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Kota Cimahi	47%	466.565.850	APBD	
2	20	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Kota Cimahi	300	466.565.850	APBD	
2	20	02	2,01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Cimahi	0	-	APBD	
2	20	02	2,01	0002	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Cimahi	0	-	APBD	
2	20	02	2,01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kota Cimahi	180	71.332.000	APBD	
2	20	02	2,01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kota Cimahi	20	395.233.850	APBD	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Kota Cimahi	412			
2	21		2,01		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Kota Cimahi	100,00%	689.160.000	APBD	
2	21	02	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Kota Cimahi	5	468.310.000	APBD	

2	21	02	2,01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Cimahi	3	171.534.000	APBD	
2	21	02	2,01	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Cimahi	25	296.776.000	APBD	
2	21	02	2,02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Kota Cimahi	25	220.850.000	APBD	
2	21	02	2,02	0001	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kota Cimahi	10	220.850.000	APBD	
2	16	02			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	78 (BB)	7.651.106.120	APBD	
2	16	01				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Kota Cimahi	79,58		APBD	
2	16	01				Nilai IKM Perangkat Daerah	Kota Cimahi	85		APBD	
2	16	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Kota Cimahi	100%	140.317.000	APBD	
2	16	01	2,01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Cimahi	2	114.975.000	APBD	
2	16	01	2,01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Cimahi	16	25.342.000	APBD	
2	16	01	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;	Kota Cimahi	12	20.942.180	APBD	
2	16	01	2,03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Cimahi	5	20.942.180	APBD	
2	16	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cimahi	12	304.406.000	APBD	
2	16	01	2,06	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	3	54.662.000	APBD	
2	16	01	2,06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	40	55.641.000	APBD	
2	16	01	2,06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Cimahi	15	19.244.000	APBD	

2	16	01	2,06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	60	174.859.000	APBD	
2	16	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Cimahi		600.000.000		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Cimahi	1	600.000.000	APBD	
2	16	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Cimahi	12	158.019.000	APBD	
2	16	01	2,08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	16	60.000.000	APBD	
2	16	01	2,08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Cimahi	16	3.800.000	APBD	
2	16	01	2,08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Cimahi	16	94.219.000	APBD	
2	16	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Cimahi	12	274.747.000	APBD	
2	16	01	2,09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Cimahi	5	150.022.000	APBD	
2	16	01	2,09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Cimahi	1	95.475.000	APBD	
2	16	01	2,09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Cimahi	18	29.250.000	APBD	
2	16	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Kota Cimahi	100%	343.216.000	APBD	
2	16	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Cimahi	37	21.600.000	APBD	
2	16	01	2,05	0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	40	167.726.000	APBD	
2	16	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	11	153.890.000	APBD	
2	16	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Kota Cimahi	12	5.809.458.940	APBD	

2	16	01	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	34	5.788.828.940	APBD	
2	16	01	2.02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Cimahi	18	20.630.000	APBD	
Jumlah									17.285.270.330		

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Cimahi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2025, terutama dalam rencana pencapaian kinerja.

Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam BAB III dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan asumsi penyediaan dana sesuai dengan yang diperkirakan. Rencana target kinerja dan anggaran belum mempertimbangkan aspek ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah akan menjadi dokumen perencanaan jangka pendek yang dijadikan pedoman oleh Dina Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki peran yang penting dalam merumuskan program, kegiatan, dan anggaran tahunan pemerintah daerah sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan

Cimahi, 2024
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA CIMAHI



HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720301 199203 1 012